

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan permasalahan dalam suatu perusahaan yang saat ini sering terjadi di dunia bisnis, hal ini menuntut pengelola perusahaan dan pemegang saham untuk saling bekerjasama agar perusahaan dapat meningkatkan mutu dan kinerja perusahaan agar terhindar dari *financial distress* perusahaan dengan menerapkan mekanisme *good corporate governance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi laporan tahunan PT. Krakatau Steel tahun 2009-2018. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini *financial distress* dihitung dengan menggunakan analisis z-score dengan nilai rata-rata perusahaan adalah $0,5320 < 1,1$ maka perusahaan dikategorikan mengalami kondisi “kesulitan keuangan”. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Sedangkan biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* dengan memberikan kontribusi persentase sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata kunci: *good corporate governance* dan *financial distress*.

ABSTRACT

This research explains the problems in a company that currently often occurs in the business world, this requires company managers and shareholders to cooperate with each other so that companies can improve the quality and performance of the company in order to avoid corporate financial distress by implementing a mechanism of good corporate governance. This study uses secondary data with PT. Krakatau Steel in 2009-2018. The method used to determine the sample of this study was using purposive sampling. The method used is multiple linear regression. The results of this research are financial distress calculated using z-score analysis with an average value of the company is $0.5320 < 1.1$, the company is categorized as experiencing a "financial difficulty" condition. From the results of hypothesis testing shows that the cost of managerial agency, the proportion of independent commissioners, the board of directors and the board of commissioners partially has no effect on the condition of financial distress. While the managerial agency costs, the proportion of independent commissioners, the board of directors and the board of commissioners simultaneously influence the condition of financial distress by contributing a percentage of 74%, while the remaining 26% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: good corporate governance and financial distress.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk menyelesaikannya.

Persembahan :

- Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam menjalani kehidupan ini.
- Ibu dan ayah tercinta
- Teman-temanku angkatan 2018 serta almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Mekanisme *Corporate Governance* Dalam Perusahaan Yang Mengalami Masalah Keuangan Pada PT. Krakatau Steel”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.

5. Bapak Wan Fachruddin, SE., M.Si., AK., CA selaku pembimbing II yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Pengajar Prodi Akuntansi Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ayahanda serta Ibunda tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan dorongan yang luar biasa selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu berbagai masukan, kritikan, dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan dari penelitian dan penulisan skripsi ini.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Nadira Ulvi
NPM : 1825100234

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	11
1.2.1 Identifikasi Masalah	11
1.2.2 Batasan Masalah	12
1.3 Perumusan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.1.3 Manfaat <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.4 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.5 <i>Corporate Governance</i> pada BUMN	21
2.1.6 <i>Financial Distress</i>	23
2.1.7 Jenis-Jenis <i>Financial Distress</i>	24
2.1.8 Kategori Penggolongan <i>Financial Distress</i>	25
2.1.9 Cara Memprediksi <i>Financial Distress</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis	36

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	37
3.2.2 Waktu Penelitian	37
3.3 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.4.1 Variabel Penelitian	39
3.4.2 Definisi Operasional	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisa Data.....	41
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	41
3.6.2 Regresi Linier Berganda.....	43

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	45
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	48
4.1.3 Uraian Struktur Organisasi Perusahaan	48
4.1.4 Pembahasan Kegiatan Perusahaan	53
4.1.5 Penyajian Data	56
4.1.6 Analisis dan Evaluasi	58
4.1.7 Pengujian Hipotesis.....	64
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Landasan Teori.....	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perombakan Jajaran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Krakatau Steel dari Tahun 2009-2018.....	4
2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	28
3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Penelitian.....	38
4.1 Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Tahun 2009-2018	53
4.2 Tabulasi Data PT. Krakatau Steel.....	56
4.3 Statistik Deskriptif	57
4.4 Uji Normalitas	59
4.5 Uji Multikolinearitas	60
4.6 Uji Autokorelasi.....	61
4.7 Regresi Linier Berganda.....	63
4.8 Uji t Parsial	64
4.9 Uji f Simultan	65
4.10 Koefisien Determinasi.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafik Perkembangan Biaya Agensi Manajerial PT. Krakatau Steel Tahun 2009-2018.....	3
2.1 Kerangka Konseptual.....	32
4.1 Struktur Organisasi.....	49
4.2 Scatterplot.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

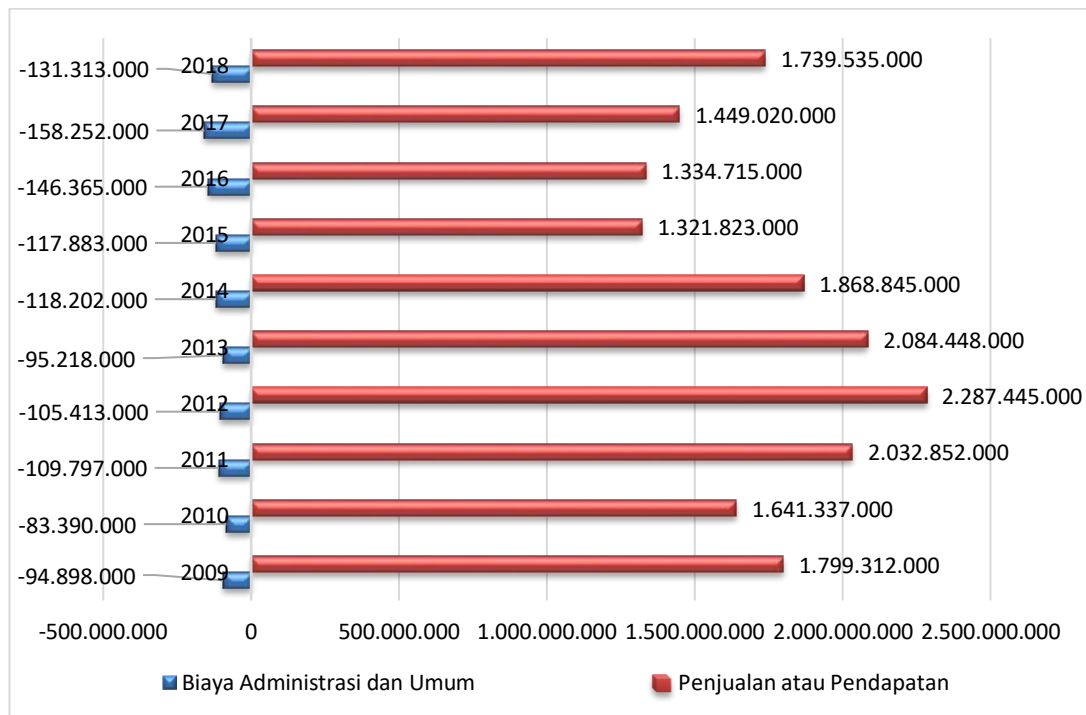
1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. CG memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Pelaksanaan CG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme CG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, penerapannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara menyeluruh, sehingga apabila manajer puncak menyimpang dari amanat yang diberikan oleh pemilik atau pemegang saham, CG dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditor sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan bahwa investor akan memperoleh *return* yang sesuai atas investasi yang telah dilakukannya.

Isu mengenai CG dalam beberapa dekade terakhir memperoleh perhatian yang semakin meningkat baik secara konseptual maupun praktikal dari berbagai kalangan. Pentingnya CG dipicu oleh semakin banyaknya persaingan bisnis dan masih lemahnya CG yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia sehingga perbaikan kinerja tidak tercapai dan mengakibatkan kesulitan keuangan perusahaan (*financial*

distress). Terdapat tiga proses dimensi yang terdiri dari *time frame*, *financial distress*, dan *process stages*. *Financial distress cycle* dalam perusahaan, mencakup periode awal penurunan kinerja hingga ke titik terendah kemudian tahap pemulihan apabila perusahaan bisa memperbaiki kinerjanya. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan tersebut tidak berada di posisi yang sama melainkan terus bertransisi ke tahapan-tahapan selanjutnya. Apabila kinerja semakin buruk, maka kemungkinan besar perusahaan akan menghadapi kebangkrutan. Namun, jika kinerja perusahaan membaik maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangan.

Dalam penelitian Pramuditya (2014), Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institutional, dan biaya agensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Dalam penelitian Sari (2018), GCG secara positif berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan dengan diukur menggunakan *efficiency* dari empat proksi GCG yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan keberadaan wanita pada dewan direksi.



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Biaya Agensi Manajerial PT. Krakatau Steel Tahun 2009-2018

Sumber: Laporan Tahunan PT. Krakatau Steel

Dalam Biaya Agensi Manajerial, umumnya perusahaan yang memiliki biaya agensi manajerial yang besar maka didalamnya terdapat manajer perusahaan yang menggunakan sumber daya perusahaan secara *eksloitatif* untuk memenuhi tujuan mereka, dan apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat menyebabkan keadaan keuangan menurun dan meningkatkan terjadinya *financial distress*. Biaya Agensi Manajerial ini dilihat dari biaya administrasi dan umum dibagi dengan penjualan atau pendapat. Tahun 2009 biaya administrasi dan umum sebesar -94.898.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.799.312.000, tahun 2010 biaya administrasi dan umum sebesar -83.390.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.641.337.000, tahun 2011 biaya administrasi dan umum sebesar -109.797.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 2.032.852.000, tahun 2012 biaya administrasi dan umum sebesar -105.413.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 2.287.445.000,

tahun 2013 biaya administrasi dan umum sebesar -95.218.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 2.084.448.000, tahun 2014 biaya administrasi dan umum sebesar -118.202.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.868.845.000, tahun 2015 biaya administrasi dan umum sebesar -117.883.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.321.823.000, tahun 2016 biaya administrasi dan umum sebesar -146.365.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.334.715.000, tahun 2017 biaya administrasi dan umum sebesar -158.252.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.449.020.000, tahun 2018 biaya administrasi dan umum sebesar -131.313.000 dan penjualan atau pendapatan sebesar 1.739.535.000.

Tabel 1.1 Perombakan Jajaran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
PT. Krakatau Steel Tahun 2009-2018

Tahun	Dewan Direksi	Dewan Komisaris
2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Fazwar Bujang 2. Direktur : Syahrir Syah Pohan 3. Direktur : Yerry 4. Direktur : Sukandar 5. Direktur : Dadang Danusiri : 6. Direktur : Irvan Kamal Hakim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Zacky Anwar 2. Komisaris : Mohamad Imron Zubaidy 3. Komisaris : Anshari Bukhari 4. Komisaris : Alexander Rusli
2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Fazwar Bujang 2. Direktur Produksi : Syahrir Syah Pohan 3. Direktur Logistik : Yerry 4. Direktur Keuangan tidak terafiliasi : Sukandar 5. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Dadang Danusiri 6. Direktur Pemasaran : Irvan Kamal Hakim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Zacky Anwar 2. Komisaris : Ansari Bukhari 3. Komisaris Independen : Mochammad Imron Zubaidy 4. Komisaris Independen : Alexander Rusli

2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Fazwar Bujang 2. Direktur Produksi : Syahrir Syah Pohan 3. Direktur Logistik : Yerry 4. Direktur Keuangan tidak terafiliasi : Sukandar 5. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Dadang Danusiri 6. Direktur Pemasaran : Irvan Kamal Hakim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Zacky Anwar 2. Komisaris : Ansari Bukhari 3. Komisaris : Wahyu Hidayat 4. Komisaris Independen : Mochammad Imron Zubaidy 5. Komisaris Independen : Achmad S. Ruky
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Irvan Kamal Hakim 2. Direktur Produksi : Hilman Hasyim 3. Direktur Logistik : Imam Purwanto 4. Direktur Keuangan tidak terafiliasi : Sukandar 5. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Dadang Danusiri 6. Direktur Pemasaran : Yerry 7. Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha : Widodo Setiadharmaji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Zacky Anwar 2. Komisaris : Ignatius Rusdonobanu 3. Komisaris : Tubagus Farich Nahril 4. Komisaris Independen : Mochammad Imron Zubaidy 5. Komisaris Independen : Achmad Sofyan Ruky
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama: Irvan Kamal Hakim 2. Direktur Produksi: Hilman Hasyim 3. Direktur Keuangan (Independen): Sukandar 4. Direktur SDM dan Umum: Dadang Danusiri 5. Direktur Pemasaran: Yerry 6. Direktur Logistik: Imam Purwanto 7. Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha: Widodo Setiadharmaji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama: Zacky Anwar 2. Komisaris: Binsar H. Simanjuntak 3. Komisaris: Tubagus Farich Nahril 4. Komisaris Independen: Mohammad Imron Zubaidy 5. Komisaris Independen: Achmad Sofjan Ruky
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama: Irvan Kamal Hakim 2. Direktur Produksi: Hilman Hasyim 3. Direktur Keuangan (Independen): Sukandar 4. Direktur SDM dan Umum: Dadang Danusiri 5. Direktur Pemasaran: Yerry 6. Direktur Logistik: Imam Purwanto 7. Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha: Widodo Setiadharmaji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama: Zacky Anwar 2. Komisaris: Binsar H. Simanjuntak 3. Komisaris: Tubagus Farich Nahril 4. Komisaris: Budi Darmadi 5. Komisaris Independen: Mohammad Imron Zubaidy 6. Komisaris Independen: Achmad Sofjan Ruky

2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama: Sukandar 2. Direktur: Hilman Hasyim 3. Direktur: Dadang Danusiri 4. Direktur: Imam Purwanto 5. Direktur: Anggiasari Hindratmo 6. Direktur: Ogi Rulino 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama: Achmad Sofjan Ruky 2. Komisaris: Binsar H. Simanjuntak 3. Komisaris: Tubagus Fachry Nachril 4. Komisaris Independen: Hilmar Farid 5. Komisaris: Roy E. Maningkas 6. Komisaris: Harjanto
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama: Sukandar 2. Direktur: Hilman Hasyim 3. Direktur: Dadang Danusiri 4. Direktur: Imam Purwanto 5. Direktur: Ogi Rulino 6. Direktur: Tambok P. Setyawati S 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama: Binsar H. Simanjuntak 2. Komisaris Independen : Tubagus Fachry Nachri 3. Komisaris Independen: Roy E. Maningkas 4. Komisaris: Harjanto 5. Komisaris: Ridwan Djamiludin
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Mas Wigrantoro Roes Setiyadi 2. Direktur Keuangan : Tardi 3. Direktur SDM : Rahmad Hidayat 4. Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha : Ogi Rulino 5. Direktur Produksi : Wisnu Kuncoro 6. Direktur Komersial : Purwono Widodo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan 2. Komisaris : Ridwan Djamiluddin 3. Komisaris : Dadang Kurnia 4. Komisaris : Nanang Pamudji Mugasejati 5. Komisaris Independen : Roy E. Maningkas 6. Komisaris Independen : Nana Rohana
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Silmy Karim 2. Direktur Keuangan : Tardi 3. Direktur SDM : Rahmad Hidayat 4. Direktur Pengembangan Usaha : Melati Sarmita 5. Direktur Produksi : Djoko Mulyono 6. Direktur Komersial : Purwono Widodo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama: I Gusti Putu Suryawirawan 2. Komisaris : Ridwan Djamiluddin 3. Komisaris : Dadang Kurnia 4. Komisaris : Nanang Pamudji Mugasejati 5. Komisaris Independen : Roy E. Maningkas 6. Komisaris Independen : Nana Rohana

Sumber: Laporan Tahunan PT. Krakatau Steel

Dalam proporsi komisaris independen, umumnya perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang lebih besar akan memiliki *corporate governance* yang lebih baik. Proporsi komisaris independen ini dilihat dari banyaknya komisaris independen dibagi dengan total komisaris dalam dewan. Tahun 2009 dewan

komisaris terdiri dari 4 dewan dimana dari 4 dewan tersebut tidak ada dewan komisaris independen, tahun 2010 dewan komisaris terdiri dari 4 dewan dan 2 dari 4 dewan tersebut adalah komisaris independen yaitu Mochammad Inron Zubaidy dan Alexander Rusli, tahun 2011 sampai dengan 2013 dewan komisaris terdiri dari 5 dewan dan 2 dari 5 dewan tersebut adalah komisaris independen yaitu Mohammad Imron Zubaidy dan Achmad S. Ruky, tahun 2014 dewan komisaris terdiri dari 6 dewan dan 2 dari 6 dewan tersebut adalah komisaris independen yaitu Mohammad Imron Zubaidy dan Achmad S. Ruky, tahun 2015 dewan komisaris terdiri dari 6 dewan dan 1 dari 6 dewan tersebut adalah komisaris independen yaitu Hilmar Farid, tahun 2016 dewan komisaris terdiri dari 5 dewan dan 2 dari 5 dewan tersebut adalah komisaris independen yaitu Tubagus Fachry Nachri dan Roy E. Maningkas, tahun 2017 sampai dengan 2018 dewan komisaris terdiri dari 6 dewan dan 2 dari 6 dewan tersebut adalah komisaris independen yaitu Roy E. Maningkas dan Nana Rohana.

Dalam perombakan jajaran dewan direksi dan dewan komisaris dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 terus terjadi. Tahun 2009 sampai dengan 2011 di jajaran dewan direksi tidak terjadi perubahan ataupun perombakan, tahun 2009 sampai dengan 2010 jajaran dewan komisaris sama, namun di tahun 2011 bertambah satu komisaris yaitu Wahyu Hidayat dan posisi Alexander Rusli sebagai komisaris independen diganti dengan Achmad S Ruky. Tahun 2011 sampai dengan 2012 hampir semua dewan dirombak, pada tahun 2011 direktur utama Fazwar Bujang diganti oleh Irvan Kamal Hakim yang sebelumnya menjabat sebagai direktur pemasaran di tahun 2012, tahun 2011 direktur produksi Syahrir Syah Pohan diganti posisinya oleh Hilman Hasyim, tahun 2011 direktur logistik Yerry diganti posisinya oleh Imam Purwanto dan ditempatkan sebagai direktur pemasaran tahun 2012, tahun

2011 dan 2012 direktur keuangan tidak terafiliasi sukandar dan direktur SDM Danang Danusiri berada diposisi yang sama, di tahun 2012 ditambah direktur baru yaitu direktur teknologi dan pengembangan usaha oleh Widodo Setiadharmaji. Untuk posisi komisaris dua dewan komisaris yaitu Anshari Bukhari dan Wahyu Hidayat diganti posisinya oleh Ignatius Rusdonobanu dan Tubagus Farich Nahril. Tahun 2012 sampai dengan 2013 dewan direksi dan dewan komisaris sama, tahun 2013 sampai dengan 2014 dewan direksi sama, namun ada satu penambahan dewan komisaris oleh Budi Darmadi.

Tahun 2015, Irvan Kamal Hakim lengser dari kursi nomor satu digantikan Sukandar yang sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan. Ada dua nama baru dalam jajaran direksi, yaitu Anggiasari Hindratmo dan Ogi Rulino. Dalam jajaran dewan komisaris, tiga tokoh baru menggeser tiga komisaris lama. Mereka adalah Roy E. Maningkas, Hilmar Farid, dan Harjanto yang melengserkan Zacky Anwar Makarim, Mohammad Imron Zubaidy, dan Budi Darmadi dalam dewan pengawas. Tahun 2016, terdapat satu nama baru dalam jajaran direksi yaitu Tambok P Setyawati yang menggantikan Anggiasari Hindratmo. Sementara di jajaran dewan komisaris terjadi pengurangan jumlah, dari sebelumnya enam menjadi lima. Pada posisi Komisaris Utama terdapat nama Binsar Simanjuntak menggantikan Achmad Sofjan Ruky. Komisaris Independen terdiri dari dua orang, yakni Tubagus Farich Naril yang menggantikan Hilmar Farid dan Roy E Maningkas yang sebelumnya Komisaris, serta seorang Komisaris baru, Ridwan Djamaludin.

Tahun 2017, Ada dua nama baru dalam jajaran direksi baru Krakatau Steel, yakni Mas Wigrantoro Roes Setiyadi yang menjabat Direktur Utama menggantikan Sukandar. Dua lainnya yakni Purwono Widodo, menggantikan Dadang Danusiri

sebagai Direktur Pemasaran, dan Direktur Produksi dan Teknologi yang baru Wisnu Kuncoro, menggantikan Hilman Hasyim. Sementara dalam jajaran dewan komisaris, dari yang sebelumnya berjumlah lima, komposisinya kini bertambah menjadi enam orang. Binsar H.Simanjuntak masih bertahan didaulat sebagai Komisaris Utama, sementara ada penempatan 3 orang komisaris baru lainnya, salah satunya Komisaris Independen atas nama Nana Rohana, yang menggantikan Tubagus Farich Naril. Dan Tahun 2018, Dalam perombakan direksi ini terdapat dua nama baru. Direktur Produksi dan Teknologi yang sebelumnya dijabat Wisnu Kuncoro, kini diganti oleh Djoko Muljono. Selain itu, kursi Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha yang dijabat Ogi Rodinho kini diganti oleh Melati Sarmita. Sementara Purwono Widodo yang sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran kini menjabat Direktur Komersial. Untuk kursi Direktur Utama dan jajaran komisaris tidak berubah. Kursi orang nomor 1 di KS ini masih ditempati oleh Silmy Karim. Begitu juga Direktur SDM, Rahmad Hidayat dan Direktur Keuangan, Tardi. Komisaris Utama masih dijabat I Gusti Putu Suryawirawan, Komisaris, Ridwan Djamaluddi, Dadang Kurnia dan Nanang Pamuji Mugasejati serta Komisaris Independen yakni Roy E Maningkas dan Nana Rohana.

Perombakan jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan mulai tahun 2015 untuk memajukan perusahaan yang selama tiga tahun terakhir terus mengalami kerugian. Tahun buku 2014, perusahaan merugi US\$ 149,8 juta. Tahun buku 2013, perseroan juga mencatatkan kerugian US\$ 13,9 juta. Sedangkan tahun buku 2012, perusahaan membukukan kerugian US\$ 20,4 juta. Dengan kinerja tersebut, para karyawan meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham mayoritas untuk merombak jajaran manajemen. Mereka mengharapkan, dengan perombakan tersebut ada harapan baru

yang bisa mendorong kinerja perusahaan sehingga berdampak kepada kesejahteraan karyawan. Perombakan jajaran dewan direksi dan komisaris yang dilakukan tahun 2015, merupakan puncak kerugian perusahaan yaitu sebesar US\$ 326,514 juta. Adapun mulai tahun 2016, kerugian perusahaan turun menjadi US\$ 180,724 juta. Tahun 2017, kerugian perusahaan turun kembali menjadi US\$ 81,74 juta dan tahun 2018, kerugian perusahaan turun kembali menjadi US\$ 74,82 juta.

Pada 22 maret 2019 petingginya Wisnu Kuncoro Direktur Teknologi dan Produksi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah Operasi tangkap tangan (OTT) dan dinyatakan sebagai tersangka atas kasus suap pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 24 milyar dan Rp 2,4 milyar atas pengerjaan dua proyek. Pada awal tahun sebelum Wisnu Kuncoro ditangkap, perusahaan baru saja mengumumkan bahwa kinerja keuangan tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp. 1,07 triliun atau senilai US\$77 juta sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2017 yang juga membukukan kerugian, namun lebih dalam 10,38% yakni sebesar US\$86 juta. Oleh karena itu, untuk mengisi posisi Wisnu Kuncoro tersangka kasus korupsi, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Perombakan dilakukan dengan mengubah struktur dewan direksi dan mengangkat dua direktur baru, serta adanya perubahan nomenklatur jabatan direksi.

Masalah lain yang muncul adalah rencana restrukturisasi perusahaan yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki kinerja malah menimbulkan masalah baru. Terdapat 1300 karyawan akan kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Periode Juni 2019, 300 karyawan *outsourcing* sudah di rumahkan, dan menyusul Juli 2019 ini 800 karyawan lain. Beberapa masalah baru yang dibebankan ke publik oleh salah satu komisarisnya yang juga merupakan komisaris Independen, Roy Maningkas

mengajukan pengunduran diri karena tidak menyetujui salah satu proyek yakni proyek *blast furnace* atau biasa juga disebut dengan tanur tiup digunakan untuk mereduksi secara kimia dan mengkonversi secara fisik bijih besi yang padat. Proyek ini sudah terlambat 72 bulan dari jadwal operasinya. Selain itu, biaya yang dihabiskan proyek ini juga melebihi modal awal sebesar Rp. 7 triliun menjadi Rp. 10 triliun. Padahal dewan komisaris sudah meminta berkali-kali agar dilakukan audit bisnis maupun audit teknologi untuk mengetahui keandalan, keamanan, dan efisiensi proyek *blast furnace* ini, tetapi masih belum dilakukan.

Dari uraian di atas, tampak bahwa CG PT. Krakatau Steel dalam beberapa tahun baik sehingga mendapat beberapa penghargaan di tahun 2010-2011, namun setelahnya banyak kerugian yang muncul. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Masalah Keuangan Pada PT. Krakatau Steel”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Biaya agensi manajerial mengalami naik turun dari tahun 2009 sampai dengan 2018, meskipun dari tahun 2009 sampai dengan 2017 biaya agensi manajerial terus menurun dan di tahun 2018 biaya agensi manajerial naik, kesulitan keuangan perusahaan masih menjadi masalah.

2. Proporsi komisaris independen mengalami naik turun, meskipun tahun 2010 sampai dengan 2018 terdapat komisaris independen dalam dewan komisaris, kesulitan keuangan perusahaan masih menjadi masalah.
3. Dewan direksi dirombak mulai tahun 2015 merupakan puncak dari kerugian perusahaan, meskipun tahun 2016 sampai dengan 2018 kerugian terus menurun, kesulitan keuangan perusahaan masih menjadi masalah.
4. Dewan komisaris dirombak mulai tahun 2015 merupakan puncak dari kerugian perusahaan, meskipun tahun 2016 sampai dengan 2018 kerugian perusahaan terus menurun, kesulitan keuangan perusahaan masih menjadi masalah.
5. Biaya agensi manajerial yang mengalami penurunan, proporsi komisaris independen tahun 2010 sampai dengan 2018 terdapat komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris dirombak menyebabkan kerugian perusahaan, meskipun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 kerugian terus menurun, kesulitan keuangan perusahaan masih menjadi masalah.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah, dan karena keterbatasan kemampuan serta waktu, maka beberapa batasan masalah akan diberikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada mekanisme *good corporate governance* yang terbagi atas biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan dewan komisaris, terhadap *financial distress*.
2. Data penelitian yang digunakan merupakan data laporan tahunan PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah biaya agensi manajerial secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel?
2. Apakah proporsi komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel?
3. Apakah dewan direksi secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel?
4. Apakah dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel?
5. Apakah biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh biaya agensi manajerial secara parsial terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018.
- b. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen secara parsial terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018.
- c. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi secara parsial terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018.

- d. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris secara parsial terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018.
- e. Untuk mengetahui pengaruh biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan dewan komisaris secara simultan terhadap kondisi *financial distress* pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti yang akan dicapai dari:

- a. Aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi peneliti berikutnya dalam hal mengkaji mekanisme *corporate governance* terutama bagi perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh akademi dalam Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sebagai referensi perpustakaan.

- b. Aspek Praktis (Guna Laksana)

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan bisa memberikan kegunaan praktis bagi pihak:

- 1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan pada PT. Krakatau Steel.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keuangan khususnya tentang masalah mekanisme *good corporate governance* perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih jauh terutama yang berkaitan dengan masalah *good corporate governance* dan masalah keuangan pada PT. Krakatau Steel.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mutiara Sakti (2018), Universitas Lampung Bandar Lampung berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Mekanisme *Corporate Governance* Dalam Perusahaan Yang Mengalami Masalah Keuangan pada PT. Krakatau Steel”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Model Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan model pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* dengan regresi linier berganda untuk 8 (delapan) variabel. Untuk penelitian ini menggunakan model pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* dengan regresi linier berganda untuk 5 (lima) variabel.
2. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 7 (tujuh) variabel bebas (dewan direksi, dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan biaya agensi manajerial) serta 1 (satu) variabel terikat (*financial distress*). Penelitian ini menggunakan menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu (biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan dewan komisaris) serta 1 (satu) variabel terikat (*financial distress*).

3. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini tahun 2020.
4. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di Bandar Lampung dengan Objek Penelitian BEI pada Perusahaan BUMN sedangkan Penelitian ini di Medan dengan Objek Penelitian di laporan tahunan PT.Krakatau Steel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. CG juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.

Menurut Kusmayadi (2015 : 8) “*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.”

Definisi lain dari CG menurut Lukviarman (2016 : 75) “*Corporate Governance* merupakan sebuah sistem terbuka didasarkan pada paradigma fungsionalis yang merupakan landasan filosofis dari konsepsi *governance*. Paradigma ini, jika dihubungkan dengan makna *corporate governance*, memberikan penekanan pada perlunya upaya untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas di dalam kehidupan sosial. Paradigma fungsional mensyaratkan setiap individual atau kelompok yang berkepentingan dengan korporasi melaksanakan fungsinya dan menjaga hubungannya sesuai dengan struktur yang diatur perundang-undangan di dalam suatu sistem atau lingkungan tempat korporasi berada”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengontrol dengan merinci aturan atau prosedur tentang pengambilan keputusan terkait urusan perusahaan, mengarahkan dengan membimbing perusahaan untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan

sebelumnya, dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan terarah lebih baik dari sebelumnya, hal tersebut yang mengacu pada satu tujuan yaitu berusaha menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien sekaligus mampu melindungi hak-hak dari para pelaku perusahaan sehingga terwujudlah perusahaan yang lebih baik, produktif dan akhirnya akan tercipta stabilitas ekonomi nasional.

2.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip mendasar dari kegiatan-kegiatan perusahaan atau korporasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi investor dan *stakeholder*. Prinsip-prinsip GCG menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar berjalan lancar dilihat dari prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), Responsibilitas (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) atau dikenal sebagai TARIF.

Menurut Qolbia (2017 : 5), prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. ***Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)***

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3 Manfaat *Corporate Governance*

Pelaksanaan CG memiliki peranan penting dan manfaat yang dapat membawa perubahan yang positif bagi perusahaan baik bagi investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan pelaksanaan CG yang baik masa depan perusahaan dapat menjadi lebih baik karena akan meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan dari investor.

Menurut Kusmayadi (2015 : 13), manfaat CG adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.1.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* (CG) merupakan suatu aturan main, prosedur-prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme CG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya

sistem dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan menjalankan mekanisme CG dengan baik, maka perusahaan dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh manajemen yang dapat merugikan pihak investor atau pemegang saham dan dapat menjadi perusahaan yang sehat.

Menurut Barus dan Setiawan (2015 : 33) “Mekanisme CG sebagai seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan internal atau eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Hadi dan Andayani (2014 : 79) “Mekanisme CG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi sistem dalam sebuah organisasi serta diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan”. Mekanisme tersebut berkaitan dengan:

a. Kepemilikan Institusional

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengidentifikasi kemampuan untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional, maka pemanfaatan aktiva perusahaan akan semakin efisien.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan ini menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer juga bertindak sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami bangkrut.

c. Dewan Direksi

Pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan ini, menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Dewan Komisaris

Organ perusahaan yang melakukan fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi ini juga memiliki peran yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham”.

2.1.5 Corporate Governance pada BUMN

Corporate Governance pada BUMN merupakan suatu sistem yang dapat menjadi kunci sukses perusahaan, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis untuk menjaga pertumbuhan usaha berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah, membantu perusahaan untuk tetap bertahan dalam persaingan dan menjadi sarana mencapai visi dan misi perusahaan.

Menurut Rusdiyanto, Susetyorini dan Elan (2019 : 89) “Isu mengenai *Corporate Governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Buruknya pelaksanaan *Corporate Governance*, maka tingkat kepercayaan para investor menurun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal tersebut akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi”.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang didirikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan misi dan peran miliknya. Misi BUMN sebagai sumber penerimaan negara, stabilisator, dan motivator pembangunan dituntut untuk memainkan peranan yang besar dalam

pembangunan nasional. BUMN didirikan dengan tujuan memberikan sumbangan pada perkembangan perekonomian pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi banyak orang; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, sebagaimana yang tertera pada UU 19 tahun 2003.

Dalam praktiknya pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui laporan keuangan, informasi yang diungkapkan oleh pemerintah dapat memberikan kondisi aktual yang menggambarkan kualitas manajemen dan kinerja BUMN. Oleh karena itu, peran dan tugas dewan legislatif sebagai otoritas yang kompeten juga diperlukan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan BUMN dalam rangka mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance*.

Dalam CNN Indonesia tahun 2015, Pemerintah pada tahun 2015 dan 2016 telah memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN. Dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan ke parlemen, pemerintah menganggarkan PMN sebesar Rp 72,97 triliun bagi 40 BUMN yang merupakan peningkatan alokasi paling besar dibanding pos belanja lainnya. Salah satu perusahaan yang memperoleh alokasi penyertaan PMN adalah PT. Krakatau Steel senilai Rp 956 miliar, dana tersebut tidak berbentuk tunai, melainkan berupa status lunas sebagian utang perusahaan kepada pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memegang kendali sebagai struktur kepemilikan dalam memantau hasil kinerja perusahaan BUMN. Penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN, walaupun pada praktiknya terjadi kerugian di beberapa BUMN. Pada dasarnya peran pemerintah sudah sangat bagus dari segi produk hukum yang memberikan dasar pelaksanaan pencapaian tata kelola yang baik oleh BUMN. Penerapan prinsip GCG akan membuat perusahaan di Indonesia makin kompetitif di ASEAN. Hal ini sesungguhnya masih menjadi tantangan, bagaimana memberikan edukasi kepada perusahaan untuk menerapkan sistem GCG yang baik.

2.1.6 *Financial Distress*

Financial Distress adalah suatu kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami masalah atau krisis yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. *Financial Distress* terjadi saat perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada kreditur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya lagi. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.

Menurut Hanafi (2014 : 637), “*Financial distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu dari pada likuiditas jangka pendek sampai *insolvable* (utang lebih besar dari pada aset) kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat sementara, tetapi bisa berkembang menjadi lebih buruk.”

Menurut Zulaikah (2016 : 903), “*Financial distress* merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau

likuidasi. Kondisi tersebut biasanya ditandai dengan adanya penundaan pengiriman produk, kualitas produk yang menurun dan penundaan pembayaran taguhan ke bank.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa kesulitan keuangan atau *financial distress* merupakan suatu kondisi keuangan yang mengalami penurunan yang biasanya bersifat sementara, sebelum mengalami likuiditas tetapi bisa berkembang menjadi lebih buruk apabila kondisinya tidak cepat diatasi maka hal tersebut dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan.

2.1.7 Jenis-Jenis *Financial Distress*

Financial distress dalam perusahaan membutuhkan perhatian manajemen dan dapat menyebabkan berkurangnya perhatian pada operasi perusahaan. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan, namun jika kinerja perusahaan membaik maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatasi *financial distress*.

Menurut hery (2016:34), berikut jenis-jenis *financial distress* yaitu:

1. *Economic failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk *cost of capitalnya*. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi.

2. *Business failure*

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.

3. *Technical insolvency*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan survive. Di sisi lain, jika *technical insolvency* adalah gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju bencana keuangan (*financial disaster*).

4. *Insolvency in bankruptcy*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *Insolvent in bankruptcy* jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius dari pada *technical insolvency* karena, umumnya, ini adalah tanda *economic failure*, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang dalam keadaan *insolvent in bankruptcy* tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.

5. *Legal bankruptcy*

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

2.1.8 Kategori Penggolongan *Financial Distress*

Umumnya tanda suatu perusahaan mengalami *financial distress* diantaranya yaitu adanya penundaan pengiriman, penurunan kualitas produk dan juga penundaan pembayaran tagihan bank. Jika kondisi tersebut terjadi, maka dapat dilakukan penindakan untuk memperbaiki situasi sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan atau likuidasi.

Financial distress digolongkan menjadi 4 (empat) kategori. Menurut Fahmi (2014:95), penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Financial distress kategori A** (sangat tinggi dan benar-benar berbahaya)

Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.

2. **Financial distress kategori B** (tinggi dan dianggap berbahaya)

Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambil alihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.

3. **Financial distress kategori C** (sedang dan dianggap masih bisa menyelamatkan diri)

Perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun disisi perusahaan sudah melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi

strategi yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka memungkinkan dan keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan sebagai untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada publik atau yang dikenal dengan istilah *stock repurchase* atau *buy back*.

Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah di jual ke pasaran mengandung berbagai arti bagi perusahaan, antara lain:

- a. Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasar
 - b. Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasar, bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup
 - c. Diharapkan dengan membeli saham, *earning pershare* akan mengalami kenaikan dan
 - d. Dengan terjadinya peningkatan *earning pershare* (EPS) diharapkan *market price pershare* juga akan mengalami kenaikan.
4. **Financial distress kategori D** (rendah)

Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini terjadi pada anak perusahaan (*subsidiaries company*) maka itu bisa diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak manajemen kantor pusat (*head office management*).

2.1.9 Cara Memprediksi *Financial Distress*

Pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang *financial distress* ini, salah satu yang paling banyak digunakan dan paling populer adalah model *Altman* atau umumnya disebut dengan *Altman Z-Score*. Model ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian dan analisis secara umum.

Menurut Rudianto (2013:256), adapun formula *Altman Z-Score* adalah sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan :

1. $X_1 = \frac{\text{Modal kerja}}{\text{Total aset}}$
2. $X_2 = \frac{\text{Laba ditahan}}{\text{Total aset}}$
3. $X_3 = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aset}}$
4. $X_4 = \frac{\text{Nilai buku ekuitas}}{\text{Nilai buku hutang}}$

Nilai Z adalah indeks keseluruhan fungsi *multiple discriminant analysis* (MDA). Menurut Altman, terdapat angka-angka *cut off* nilai z yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak dimasa mendatang dan membaginya menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bila $Z < 1.1$ = kondisi “kesulitan keuangan”

Untuk nilai Z-Score lebih kecil atau sama dengan 1,1 berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan risiko tinggi.

2. Bila $1.1 < Z < 2.67$ = kondisi “Rawan”

Untuk nilai Z-Score antara 1,1 sampai 2,67 maka perusahaan dianggap berada pada daerah abu-abu (kondisi rawan). Pada kondisi ini, perusahaan mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan penanganan manajemen yang tepat. Kalau terlambat dan tidak tepat penanganannya, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan.

3. Bila $Z > 2.67$ = kondisi “Sehat”

Untuk nilai *Z-Score* lebih besar dari 2,67, memberikan penilaian bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang sehat sehingga kemungkinan bangkrut sangat kecil terjadi.

Dengan menggunakan model *Altman Z-score*, maka perusahaan dapat mengetahui tingkat kesehatan keuangannya, selain itu jika nilai *z* perusahaan termasuk dalam kategori bangkrut atau kritis maka perusahaan masih bisa memperbaiki kesehatan keuangannya dengan segera. Sehingga dengan mengetahui nilai *z* ini maka kondisi keuangan perusahaan akan semakin kuat dan dapat diantisipasi sedini mungkin sebelum kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa indikator-indikator kegagalan keuangan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Andhika Yudha Pramuditya (2014) Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang	Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi <i>Financial Distress</i>	1. Ukuran dewan komisaris 2. Komisaris independen 3. Kepemilikan manajerial 4. Kepemilikan institutional 5. Biaya agensi	<i>Financial Distress</i>	Regresi Logistik Ordinal	Ukuran dewan komisaris, kepemilikan institutional, dan biaya agensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i> . Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap

						kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i> .
2	Yuni Kurnia Sari (2018) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Financial Distress</i>	1. Profitabilitas 2. Dewan Direksi 3. Dewan Komisaris 4. Dewan Pengawas Syariah 5. <i>Gender Diversity</i>	<i>Financial Distress</i>	Regresi Logistik	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kesulitan keuangan, sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan.
3	Shintya Cahya Retnaningdy (2018) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kemungkinan Terjadinya <i>Financial Distress</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Malaysia	1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Kepemilikan Asing 4. Kepemilikan Mayoritas 5. Kinerja Keuangan	<i>Financial Distress</i>	Regresi Linier Berganda	Struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya <i>financial distress</i> pada perusahaan di Malaysia. Hal tersebut disebabkan adanya peran pasif investor dan kurangnya transparansi manajemen sehingga para investor institusi, manajerial, asing dan mayoritas tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengendalian manajemen. Akibat struktur kepemilikan yang tidak berpengaruh terhadap terjadinya <i>financial distress</i> maka kemungkinan besar manajemen

						dapat melakukan kecurangan yaitu mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, maka perusahaan menjadi lebih mudah mengalami <i>financial distress</i> .
4	Mutiara Sakti (2018) Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Bandar Lampung	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Dewan Direksi 2. Ukuran Dewan Komisaris 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 4. Kepemilikan Manajerial 5. Kepemilikan Institusional 6. Komite Audit 7. Biaya Agensi Manajerial 	<i>Financial Distress</i>	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini <i>financial distrees</i> dihitung dengan menggunakan analisis <i>z-score</i> dan hasil yang didapat yaitu rata-rata perusahaan mengalami potensi kebangkrutan dan berada di <i>grey area</i> walaupun masih ada perusahaan yang diprediksi sehat, dari sini kita dapat melihat bahwa prediksi <i>z-score</i> dalam <i>financial distress</i> dapat dijadikan sebagai bahan acuan perusahaan agar dapat memperbaiki sistem kinerja perusahaan agar ditahun mendatang pendapatan perusahaan dapat meningkat dan terhidar dari <i>financial distress</i> . Dari hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> yang

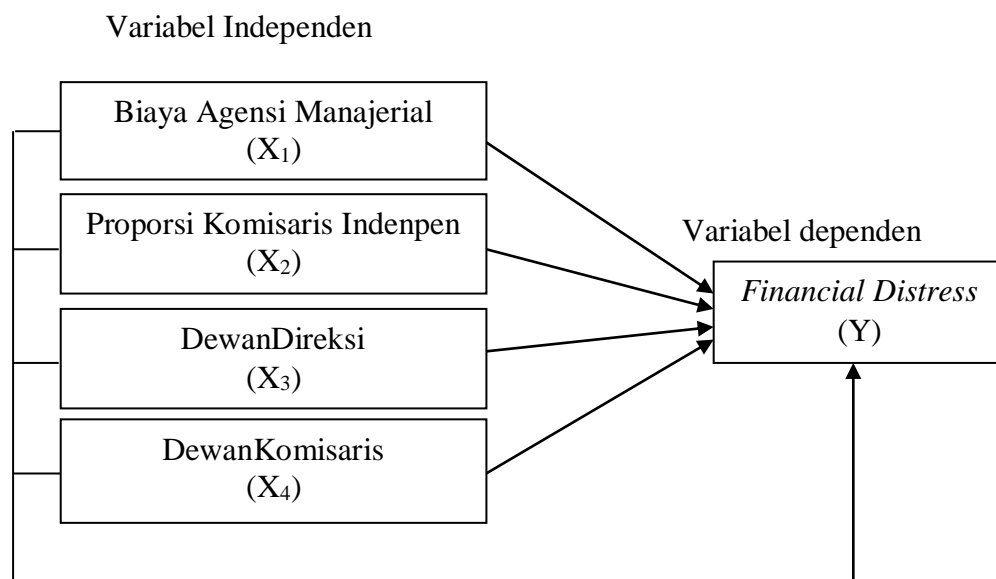
						berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> adalah kepemilikan manajerial dengan tingkat signifikan 0,029 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,005 dan biaya agensi dengan tingkat signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05. Kepemilikan manajerial dan biaya agensi manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> , jadi semakin besar kepemilikan manajerial dan biaya agensi manajerial maka semakin kecil terjadinya <i>financial distress</i> .
5	Anis Mafiroh (2016) Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i>	1. Rasio leverage, 2. Rasio likuiditas 3. Rasio aktivitas 4. Rasio profitabilitas 5. Dewan komisaris independen 6. Kompetensi komite audit	<i>Financial Distress</i>	Regresi Logistik	Rasio leverage dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap prediksi terjadinya <i>Financial Distress</i> , sedangkan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dewan komisaris independen, dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap prediksi terjadinya <i>Financial Distress</i> .

2.3 KerangkaKonseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan atau keterkaitan antar variabel dalam proses analisisnya. Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami pengaruh CG berupa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris terhadap kondisi *financial distress*.

Menurut Rusiadi (2013 : 69) “Kerangka konseptual merupakan uraian tentang hubungan antar variabel yang terkait dalam masalah terutama yang akan diteliti, sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Adapun gambar kerangkaberpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh biaya agensi manajerial terhadap kondisi *financial distress*

Biaya agensi manajerial adalah biaya-biaya yang muncul ketika manager sebagai agen yang mengelola perusahaan, biaya yang muncul seperti gaji manajerial, biaya eksekutif, biaya perjalanan, biaya hiburan, pengeluaran untuk konferensi, pembayaran kesejahteraan dan pengeluaran lain yang semuanya tercakup dalam biaya administrasi perusahaan. Menurut Yeni (2015), "biaya agensi manajerial adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengatur dan mengawasi kinerja para manajer sehingga mereka dapat bekerja untuk kepentingan perusahaan". Manajer sebagai *agent* dari pemegang saham cenderung menyalahgunakan sumber daya perusahaan untuk memenuhi tujuan *eksploratif* mereka. Dalam penggunaan sumber daya oleh manajer tidak menjamin tidak menjamin akan tercapai kinerja yang baik, selain itu apabila penggunaan sumber daya yang berlebihan tidak dapat seimbang dengan peningkatan kinerja perusahaan maka dapat menyebabkan stabilitas perusahaan terganggu.

Menurut Penelitian yang dilakukan Intan (2017), biaya agensi manajerial memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Biaya agensi manajerial meningkat dengan adanya pemisahan antara agen dan prinsipal. Semakin tinggi biaya agensi manajerial semakin tinggi *agency cost* yang terjadi. Apabila perusahaan memiliki biaya agensi manajerial yang besar maka di dalamnya terdapat manajer perusahaan yang menggunakan sumber daya perusahaan secara *eksploratif* untuk memenuhi tujuan mereka, dan apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat menyebabkan keadaan keuangan menurun dan meningkatkan terjadinya *financial distress*.

2. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kondisi *financial distress*

Proporsi Komisaris Independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama. Menurut Rusdiyanto (2019 : 81), “Proporsi Komisaris Independen merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* namun dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”. Umumnya perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar akan memiliki *corporate governance* yang lebih baik.

Menurut penelitian yang dilakukan Helena dan Saifi (2018), proporsi komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemungkinan *financial distress*. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang semakin besar maka perusahaan tersebut mengalami *financial distress* akan semakin berkurang atau semakin kecil. Ini berarti bahwa berapapun proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan tersebut mengalami tekanan keuangan adalah sama.

3. Pengaruh dewan direksi terhadap kondisi *financial distress*

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Jumlah dewan direksi yang banyak akan membantu mengatasi *agency problem* antara pemilik dengan manajemen serta dapat memonitor proses pelaporan keuangan

dengan lebih efektif dibandingkan jumlah dewan yang sedikit.

Dewan direksi tergolong variabel yang tidak konsisten terhadap *financial distress*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2018) menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi yang besar dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi sehingga dapat terhindar dari kesulitan keuangan. Namun dalam penelitian yang dilakukan Cinantya dan Merkusiwati (2015) menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh pada *financial distress*.

4. Pengaruh dewan komisaris terhadap kondisi *financial distress*

Dewan komisaris adalah pimpinan atau pengawas tertinggi dalam perusahaan yang bertanggung jawab mengawasi atas kelancaran serta kesehatan keuangan perusahaan. Komisaris disebut juga sebagai pemilik perusahaan yang bekerjasama dengan direksi untuk bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan serta membawahi pada bawahan secara efektif.

Dewan komisaris juga tergolong variabel yang tidak konsisten terhadap *financial distress*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathonah (2016) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar komposisi dewan komisaris cenderung tidak mengalami *financial distress*. Namun dalam penelitian yang dilakukan Cinantya dan Merkusiwati (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada *financial distress*.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Menurut Sugiyono (2016 : 64) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Biaya Agensi Manajerial secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

H₂: Proporsi Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

H₃: Dewan Direksi secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

H₄: Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*

H₅: Biaya Agensi Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris secara simultan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian berdasarkan data yang dihasilkan adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Manullang dan Pakpahan (2014:65), “Penelitian asosiatif atau penelitian kausal (hubungan sebab akibat) adalah akibat penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat.

Adapun variabel yang dimaksud yaitu variabel independen pada penelitian ini adalah biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah *financial distress*.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Medan dengan menggunakan laporan tahunan PT. Krakatau Stell.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Penelitian

No	Kegiatan	Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■																												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																								
4	Seminar Proposal																	■																			
5	Perbaikan Acc Proposal																	■	■	■	■																
6	Pengolahan Data																					■	■	■	■												
7	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■								
8	Sidang Meja Hijau																																				■

3.3 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016:80), “Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu”. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan tahunan PT. Krakatau Steel.

Menurut Alfianika (2018:100), “sampel adalah sejumlah contoh dari populasi dan secara langsung dijadikan sasaran penelitian”. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Krakatau Steel.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan pada periode 2009 - 2018, beberapa literatur seperti jurnal, artikel, skripsi, dan buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data laporan tahunan perusahaan tersebut diperoleh dengan mengakses situs web www.idx.co.id dan situs perusahaan yang bersangkutan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu : Biaya Agensi Manajerial (X_1), Proporsi Komisaris Independen (X_2), Dewan Direksi (X_3), dan Dewan Komisaris (X_4), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu *Financial Distress* (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana mengukur secara operasional variabel yang diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan sebuah penelitian, dapat didasarkan pada satu atau lebih referensi. Penulis menyajikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Biaya Agensi Manajerial (X ₁)	Biaya administrasi dan umum : penjualan atau pendapatan	Biaya agensi manajerial adalah biaya-biaya yang muncul ketika manager sebagai agen yang mengelola perusahaan, biaya yang muncul seperti gaji manajerial, biaya eksekutif, biaya perjalanan, biaya hiburan, pengeluaran untuk konferensi, pembayaran kesejahteraan dan pengeluaran lain yang semuanya tercakup dalam biaya administrasi perusahaan. Variabel ini diukur dengan membagi biaya administrasi dan umum dengan penjualan atau pendapatan. (Intan dan Darsono, 2017)	Rasio
Proporsi Komisaris Independen (X ₂)	Komisaris Independen: total komisaris dalam dewan	Proporsi komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama. Variabel ini diukur dengan membagi komisaris independen dengan total komisaris dalam dewan. (Mutiara, 2018)	Rasio
Dewan Direksi (X ₃)	Jumlah anggota dewan direksi	Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah dewan direksi dalam perusahaan. (Mahanafi dan Abdul Halim, 2014)	Angka
Dewan Komisaris (X ₄)	Jumlah anggota dewan komisaris	Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Dewan komisaris dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris. (Mahanafi dan Abdul Halim, 2014)	Angka

<i>Financial Distress</i> (Y)	Z-Score = 6,56X ₁ + 3,26X ₂ + 6,72X ₃ + 1,05X ₄	<i>Financial distress</i> adalah suatu kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami masalah atau krisis yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan.. Untuk menilai apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak dimasa mendatang, maka digunakan formula <i>Altman Z-Score</i> atau disebut juga dengan <i>Z-Score</i> . (Rudianto, 2013)	Angka
-------------------------------	--	--	-------

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di website resmi portal BUMN (www.bumn.go.id).
- b. *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan data berdasarkan tujuan yang diperlukan.

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan hasil analisis. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dapat dikatakan normal jika nilai signifikan pengujian *Kolmogorov Smirnov*-nya lebih besar dari 0,05.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau bebas. Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu : jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas. Namun, jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *tolerance*.

3. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian analisis statistic yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi variabel yang ada didalam model prediksi dengan perubahan waktu atau biasanya terjadi pada saat *time series* dan dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Uji DW dapat dilihat pada tabel DW dengan memperhatikan:

$d < d_L$: terdapat gejala autokorelasi positif

$d > (4 - d_L)$: terdapat gejala autokorelasi negatif

$d_L < d < (4 - d_U)$: tidak terdapat gejala autokorelasi

$d_L < d < d_U$: pengujian tidak meyakinkan

4. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun cara untuk memprediksi uji heterokedastisitas adalah

jika pola gambar *scatterplot* model tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

3.6.2 Regresi Linier Berganda

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Mekanisme CG terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan adalah model ekonometrik dengan teknik analisis menggunakan model kuadrat terkecil biasa.

Adapun model persamaannya diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = *financial distress*

α = Konstanta

β_1, \dots, β_4 = Koefisien regresi

X_1 = Biaya Agensi Mananjerial

X_2 = Proporsi Komisaris Independen

X_3 = Dewan direksi

X_4 = Dewan komisaris

e = Koefisien error

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$. Penentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternative didukung.
2. Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternative tidak didukung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT. Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi di Cilegon, Banten ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Proyek Baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Ketika dibentuk pada tanggal 20 Mei 1962, perusahaan yang dulunya bernama Cilegon Steel Mill ini resmi berdiri dengan kerja sama Tjazzpromexport dari Uni Soviet.

Namun, terjadinya gejolak politik dan ekonomi yang parah, mengakibatkan pembangunan pabrik sempat terhenti. Barulah memasuki awal 1970-an, unit pabrik dilanjutkan pembangunannya dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel. Selama dekade pertama perusahaan berdiri, Krakatau Steel telah melakukan gerak cepat dalam pembangunan kawasan operasi terpadu produksi baja di Cilegon dengan berbagai peresmian operasional perdana yang disaksikan dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto dari pusat pengolahan air terpadu,

pelabuhan Cigading, PLTU Cilegon 400 MW serta pabrik baja terpadu yang meliputi 4 produk baja utama.

Jauh sebelum gagasan industri baja nasional muncul, cikal bakal pengolahan bijih besi telah lahir sejak tahun 1861. Saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun tanur di Lampung. Pembangunan Tanur di Lampung berfungsi untuk mengolah hasil tambang bijih besi berbahan bakar batu bara. Meski berukuran kecil, industri pengolahan tersebut mampu menghasilkan baja kasar yang berfungsi untuk membuat suku cadang pabrik gula, pabrik karet, dan peralatan pertanian. Namun, industri pengolahan bijih besi tersebut tutup lantaran pengelolaannya yang tidak profesional.

Pada masa pendudukan Jepang, sebuah tanur pernah dibangun di Kalimantan Selatan dengan bahan bakar batu bara. Namun, banyaknya gejolak perang dan revolusi fisik mengakibatkan perintisan industri baja sempat terhenti. Baru pada tahun 1956, industri baja mulai mendapat perhatian dengan diperkuat adanya gagasan mendirikan industri baja nasional. Menteri Perindustrian dan Pertambangan, Chaerul Saleh bersama Djuanda dari Biro Perancang Negara (kini Bappenas), mulai menyusun cetak biru industri baja nasional. Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sangat membutuhkan keberadaan industri pengolahan bijih besi. Biro Perancang Negara menggandeng konsultan asing untuk merintis industri baja yang bernama Proyek Besi Baja Trikora.

Setelah studi kelayakan selesai disusun, Cilegon dipilih sebagai tempat pengolahan dan produksi hasil olahan bijih besi karena memiliki kelebihan seperti, lahan luas yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian, terdapat sumber air yang melimpah, aksesnya yang terjangkau dari berbagai pulau untuk mendatangkan besi tua melalui pelabuhan Merak. Penandatanganan kerja sama pembangunan dengan Tjzpromexport (*All Union Export-Import Corporation*) dari Uni Soviet pada 7 Juni 1960 berlanjut dengan peletakan batu pertama pada 20 Mei 1962. Sekali lagi, pembangunan ini kembali terhenti karena gonjang-ganjing politik G30S/PKI. Setelah vakum selama lima tahun, Proyek Besi Baja Trikora dilanjutkan lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35, 31 Agustus 1970 dengan didirikannya PT Krakatau Steel (Persero). Pendirian Krakatau Steel disahkan dengan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 34, pada tanggal 23 Oktober 1971 di Jakarta.

Sejak itu, Krakatau Steel mulai mengejar ketertinggalannya dengan mempercepat pembangunan industri baja terpadu di Indonesia. Gerak maju dan usaha keras itu dapat dilihat dari serangkaian peresmian unit-unit pabrik dan sarana pendukungnya. Pada tahun 1977, peresmian perdana oleh Presiden Soeharto sejumlah pabrik seperti, pabrik Besi Beton, pabrik Besi Profil dan Pelabuhan Cigading. Dua tahun kemudian, secara resmi pembangunan pabrik Besi Spons, pabrik Billet Baja, pabrik Batang Kawat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap 400 MW, pusat pengolahan air dan PT KHI Pipe selesai dan beroperasi penuh. Pada tahun 1983 pembangunan pabrik Slab Baja, pabrik Baja Lembaran

Panas dan pabrik Besi Spons selesai dibangun dan resmi dioperasikan. Hingga pada 1993, masih ada peresmian perluasan dan modernisasi.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi suatu konsep perencanaan dan tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimasa mendatang.

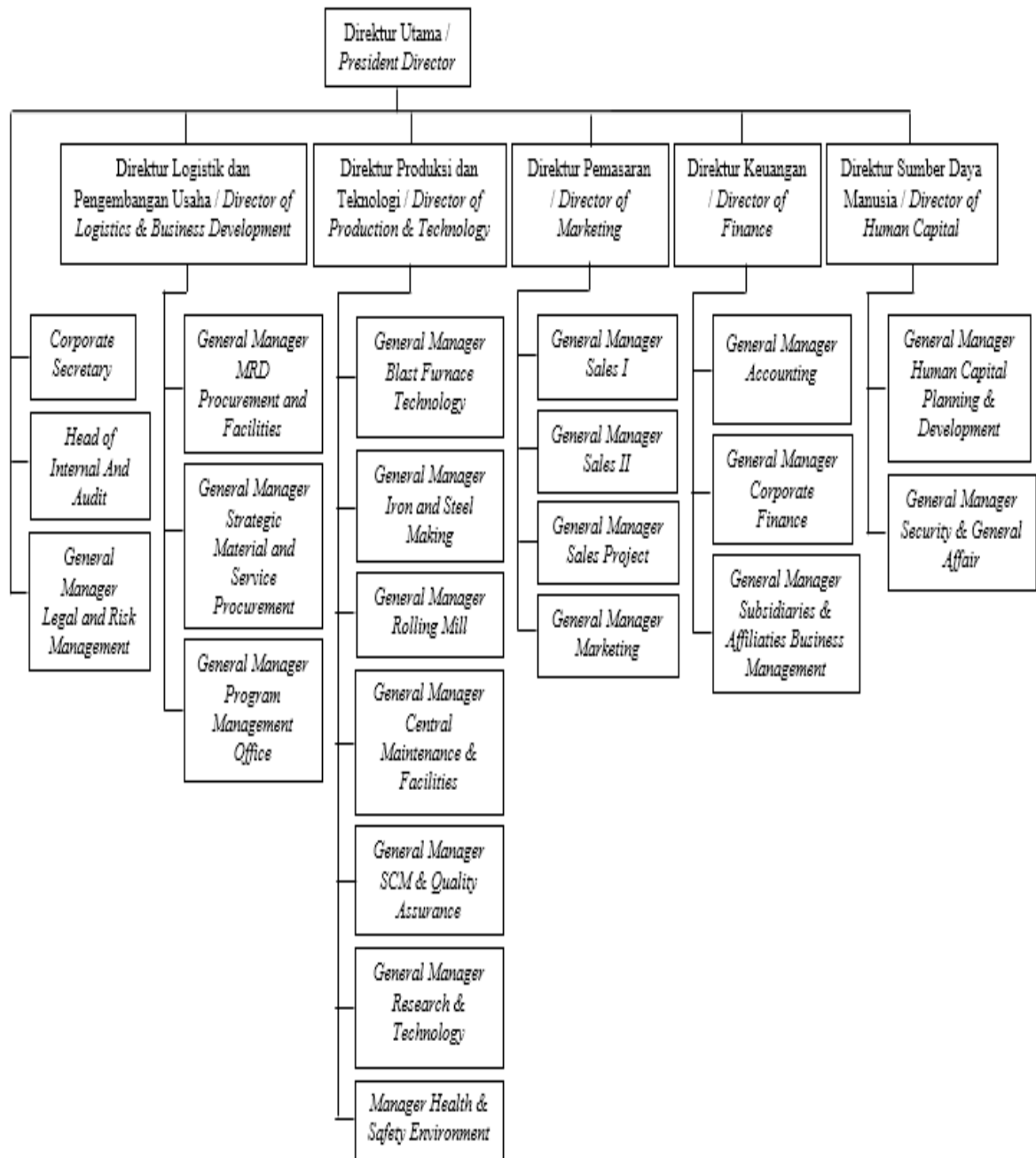
Menurut Wibisono (2013:43), “Visi merupakan rangkaian cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan sedangkan misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa”.

Adapun Visi dan Misi PT. Krakatau Steel adalah sebagai berikut:

- a. Visi adalah menjadi perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia.
- b. Misi adalah dapat menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa.

4.1.3 Uraian Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi menunjukkan berbagai departemen, fungsi dan menyatakan hubungan yang ada didalam perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Krakatau Steel adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Krakatau Steel ini berdasarkan fungsional berbentuk garis dan staf secara terbatas. Dalam struktur organisasi, jabatan direktur utama tidak termasuk dalam struktur kepegawaian karena diangkat langsung oleh Menteri Perindustrian, dalam pelaksanaannya direktur utama dibantu oleh lima direktorat.

1. Direktur Utama

Direktur Utama memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan seperti:

- a. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan;
- b. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan;
- c. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan;
- d. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan;
- e. Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang;
- g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.

2. Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha

Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan, sehingga tercapai tujuan utamanya, diantaranya:

- a. Keamanan, keakurasian jumlah dan kebutuhan barang yang dikelola, dengan melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen;
- b. Menerapkan prosedur kerja, termasuk syarat-syarat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk menjaga dan memelihara semua aset perusahaan berupa aset tetap atau aset tidak tetap;
- c. Menjaga kelancaran dan pelaksanaan semua kegiatan arus transaksi barang melalui penentuan tata letak gudang serta penunjang tenaga pelaksana, agar tercapai pemanfaatan fasilitas dan optimalisasi tenaga kerja.

3. Direktur Produksi dan Teknologi

Direktur Produksi dan Teknologi bertugas menyempurnakan organisasi, prosedur dan sistem kerja guna pencapaian dalam semua aspek, diantaranya:

- a. Menyediakan kebutuhan sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan persyaratan;
- b. Bertugas merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang;
- c. Membuat perencanaan kerja yang diselaraskan dengan tujuan manajemen khususnya dalam kegiatan yang menyangkut teknik;
- d. Menjaga pelaksanaan perawatan dan perbaikan mesin.

4. Direktur Pemasaran

Direktur pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- a. Mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran;
- b. Melakukan tugas penjualan dan permintaan produk;
- c. Menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk;
- d. Merencanakan dan membuat rancangan promosi;
- e. Membuat rencana penjualan dan permintaan produk.

5. Direktur Keuangan

Direktur keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- a. Merencanakan, menyiapkan *budget* dan *planning* (AOP) untuk menentukan tujuan yang harus dicapai;
- b. Memonitor kegiatan operasional dalam hal aspek financial supaya sejalan dengan AOP;
- c. Menandatangani bank instrument (Cek, transfer bank) sesuai dengan batasan yang ditetapkan perusahaan;
- d. Verifikasi setiap pengeluaran biaya ataupun pembelian aset dan penggunaan dana lainnya sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh perusahaan;
- e. Menetapkan pelaksanaan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan.

6. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktur SDM memiliki memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- a. Merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Selain itu Direktur SDM memiliki tugas dan tanggung jawab menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk mencapai ketenangan industrial (ketenangan kerja dan ketenangan usaha) dilingkungan perusahaan.

4.1.4 Pembahasan Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT. Krakatau Steel terutama meliputi bidang produksi, perdagangan dan pemberian jasa. Kegiatan-kegiatan perusahaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Tahun 2009-2018

Tahun	Kegiatan - Kegiatan
2009	- Di tengah krisis ekonomi global, PT Krakatau Steel (Persero) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp494,7 miliar dari pendapatan bersih sebesar Rp16,9 triliun.
2010	- Perubahan nama PT Krakatau Steel (Persero) menjadi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terkait dengan kesuksesan Penawaran Saham Perdana pada 10 November 2010.

	<ul style="list-style-type: none"> - Peletakan batu pertama dari fase I proyek konstruksi PT Krakatau Posco pada tanggal 28 Oktober 2010. PT Krakatau Posco adalah <i>joint-venture</i> antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Posco dari Korea Selatan untuk membangun pabrik baja terintegrasi berkapasitas 3 juta ton per tahun pada fase I.
2011	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang pertama kali diselenggarakan (tanggal 6 Juni 2011) setelah menjadi perusahaan terbuka. - Penyelesaian revitalisasi pabrik <i>Hot Strip Mill</i> yang meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2,4 juta ton dari sebelumnya sebesar 2 juta ton per tahun.
2012	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan Waduk Krenceng – PT Krakatau Tirta Industri berupa peningkatan kapasitas waduk dari 3 juta m³ menjadi 5 juta m³. - Proyek ekspansi iron making pembangunan Pabrik Meratus Jaya Iron & Steel (MJIS) hasil kerja sama Perseroan dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk di Batulicin, Kalimantan Selatan telah beroperasi.
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Peresmian PT Krakatau Posco oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, perusahaan baja joint venture antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO dengan kapasitas produksi 3 juta ton per tahun pada tahap pertama. Peresmian ini juga menandakan beroperasinya PT Krakatau Posco. - Pembangunan fasilitas coil center dan distribution channel PT Indo Japan Steel Center 120.000 ton per tahun sebagai distribution channel bagi produk HRC dan CRC PT KS untuk industri otomotif. PT Indo Japan Steel Center merupakan perusahaan patungan PT KS & Nippon Steel Trading. - Pembangunan pabrik kapur PT Krakatau Posco Chemtech Calcination menghasilkan kapur bakar 228.000 ton per tahun

	<p>untuk memenuhi kebutuhan kapur bakar dan dolomite PT Krakatau Posco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi – PT Krakatau Tirta Industri untuk meningkatkan suplai air bersih dari 1.200 liter/detik menjadi 1.800 liter/detik, sudah beroperasi.
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi Pipa Baja perdana Pabrik ERW #2 (Electric Resistance Welding) PT KHI Pipe Industries (“PT KHI”) pada 14 Oktober 2014. Pabrik ERW #2 ini memiliki kapasitas 115.000 ton per tahun, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi Pipa Baja PT KHI menjadi 233.000 ton per tahun.
2015	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Perseroan untuk proyek Pembangunan Hot Strip Mill ke-2 (HSM #2) senilai USD260,05 juta. - <i>Ground Breaking Ceremony</i> PT Krakatau Osaka Steel (PT KOS). - <i>Ground Breaking Ceremony</i> PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (PT KNSS). - Peletakan bata terakhir <i>Coke Oven Plant (COP) Blast Furnace</i>.
2016	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ground Breaking</i> HSM #2. - Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan sebanyak 3.571.396.900 lembar saham. - PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi beroperasi.
2017	<ul style="list-style-type: none"> - PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) mulai beroperasi.
2018	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Heating Up Hot Blast Stove</i>. - Penyalaan Perdana <i>Pabrik Blast Furnace</i>. - Peresmian proyek Bendung Cipasauran PT Krakatau Tirta Industri.

Sumber: Laporan Tahunan PT. Krakatau Steel

4.1.5 Penyajian Data

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris sebagai variabel bebas dan *financial distress* sebagai variabel terikat. Adapun data variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabulasi Data PT. Krakatau Steel

Tahun	Biaya Agensi Manajerial	Proporsi Komisaris Independen	Dewan Direksi	Dewan Komisaris	<i>Financial Distress</i>
2009	-0,04	0.00	6	4	1,74
2010	-0,05	0.50	6	4	1,63
2011	-0,05	0.40	6	5	1,63
2012	-0,05	0.40	7	5	1,38
2013	-0,05	0.40	7	5	1,30
2014	-0,06	0.33	7	6	-0,73
2015	-0,09	0.17	6	6	-0,66
2016	-0,11	0.40	6	5	0,40
2017	-0,11	0.33	6	6	0,33
2018	-0,08	0.33	6	6	-0,24

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Hasil yang diperoleh melalui pengolahan data diatas diperoleh statistik deskriptif yang memberikan penjelasan mengenai nilai rata-rata (mean) dan *standar deviation* dalam penelitian ini. Adapun deskriptif data statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Financial Distress	.5320	1.07500	10
Biaya Agensi Manajerial	-.0700	.02539	10
Proporsi Komisaris Independen	.3260	.14253	10
Dewan Direksi	6.30	.483	10
Dewan Komisaris	5.20	.789	10

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Variabel tingkat *Financial Distress*(Y) mempunyai sampel (N) sebanyak 10 dengan rata-rata (mean) 0,5320 dan *standar deviation* (simpangan baku) variabel ini sebesar 1,07500.
- b. Variabel tingkat Biaya Agensi Manajerial(X1) mempunyai sampel (N) sebanyak 10 dengan rata-rata (mean) 0,0700 dan *standar deviation* (simpangan baku) variabel ini sebesar 0,02539.
- c. Variabel tingkat Proporsi Komisaris Independen(X2) mempunyai sampel (N) sebanyak 10 dengan rata-rata (mean) 0,3260 dan *standar deviation* (simpangan baku) variabel ini sebesar 0,14253.

- d. Variabel tingkat Dewan Direksi(X3) mempunyai sampel (N) sebanyak 10 dengan rata-rata (mean) 6,30 dan *standar deviation* (simpangan baku) variabel ini sebesar 0,483.
- e. Variabel tingkat Dewan Komisaris(Y) mempunyai sampel (N) sebanyak 10 dengan rata-rata (mean) 5,20 dan *standar deviation* (simpangan baku) variabel ini sebesar 0,789.

4.1.6 Analisis dan Evaluasi

1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Asumsi normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik berupa uji *kolmogrov smirnov test* dimana dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal, namun jika nilai $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40649240
Most Extreme Differences	Absolute	.185
	Positive	.093
	Negative	-.183
Test Statistic		.185
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Hasil yang diperoleh untuk uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov test* dalam penelitian ini menunjukkan nilai $0,200 > 0,05$, artinya menunjukkan nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya.

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.475	3.009		2.484	.056		
Biaya Agensi Manajerial	23.097	11.138	.545	2.074	.093	.413	2.419
Proporsi Komisaris Independen	.665	1.327	.088	.501	.638	.924	1.082
Dewan Direksi	-.294	.505	-.132	-.132	.555	.555	1.801
Dewan Komisaris	-.709	.321	-.520	-2.211	.078	.516	1.938

a. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Ketentuan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 (dibawah 10) dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 (diatas 0,1), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

Setelah melakukan uji multikolienaritas menggunakan program pengolahan data, hasil yang diperoleh menunjukkan nilai *Tolerance* yaitu 0,413, 0,924, 0,555, dan 0,516 dan nilai VIF adalah 2,416, 1,082, 1,801, dan 1,938, artinya nilai tersebut menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periodesebelumnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan (4-du).

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926 ^a	.857	.743	.54537	2.212

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Dewan Direksi , Biaya Agensi Manajerial, Proporsi Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Financial Distress

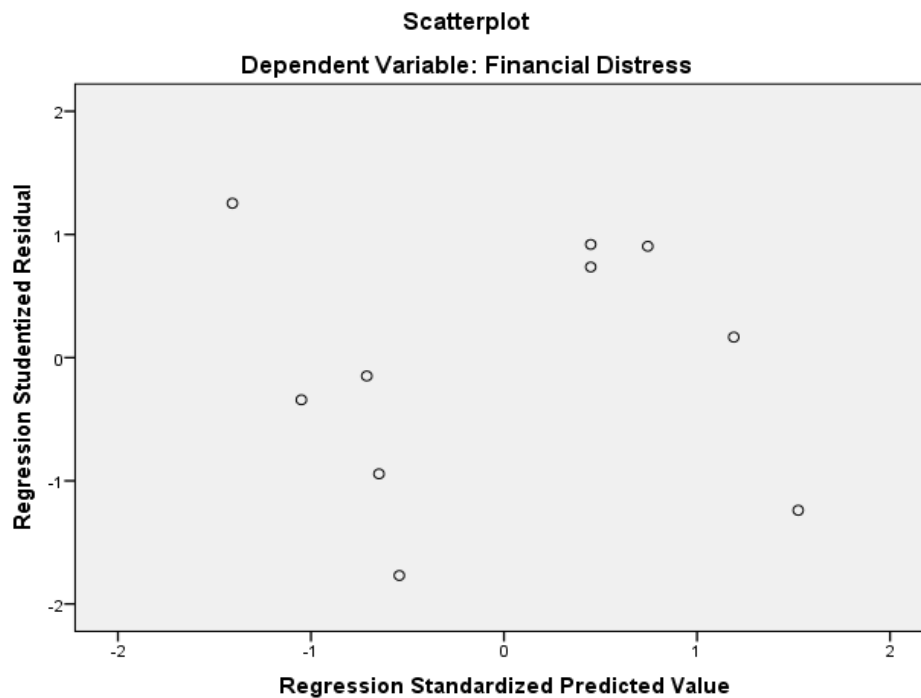
Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai statistik Durbin Watson= 2,212, banyaknya variabel bebas (k) adalah 4, banyaknya observasi (n) adalah 10, dengan signifikansi 5%. Maka nilai du (2,413) < Durbin Watson = (2,212) < 4-du (1,587). Artinya karena nilai Durbin Watson (2,212) terletak diantara du (2,413) sampai dengan 4-du (1,587), maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi kesimpulannya adalah tidak ada gejala autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan dengan Scatter-Plot dengan menggunakan SRESID dan ZPRED pada software SPSS. Menurut Ghozali (2011) dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas.



Gambar 4.2 Scatterplot

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Pengujian heteroskedistisitas pada penelitian ini tidak ditemukan titik yang membentuk pola yang teratur, sebaliknya titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat diartikan tidak terjadi heteroskedistisitas dalam penelitian ini.

2. Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, seperti yang tertera pada tabel dibawah dapat disusun persamaan model regresi penelitian ini. Adapun tabel *coefficient* yang menampilkan komponen dari persamaan model regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.475	3.009		2.484	.056		
Biaya Agensi Manajerial	23.097	11.138	.545	2.074	.093	.413	2.419
Proporsi Komisaris Independen	.665	1.327	.088	.501	.638	.924	1.082
Dewan Direksi	-.294	.505	-.132	-.132	.555	.555	1.801
Dewan Komisaris	-.709	.321	-.520	-2.211	.078	.516	1.938

a. Dependent Variable: Financial Distress
 Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Hasil yang diperoleh atas pengolahan data penelitian ini adalah nilai konstanta 7,475, b_1 atas biaya agensi manajerial adalah 23,097, b_2 atas proporsi komisaris independen adalah 0,665, b_3 atas dewan direksi adalah -0,294 dan b_4

atas dewan direksi adalah -0,709. Berdasarkan hasil dapat diinterpretasikan kedalam model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 7,474 + 23,097X_1 + 0,665X_2 + -0,294X_3 + -0,709X_4 + e$$

4.1.7 Pengujian Hipotesis

a. Uji t Parsial

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan atas uji hipotesis dilakukan dengan cara menguji nilai signifikan probabilitas. Pengujian ini memiliki karakteristik, yaitu jika probabilitas < 0.05 maka H_a diterima dan H_o ditolak dan jika probabilitas > 0.05, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Tabel 4.8 Uji t Parsial

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.475	3.009		2.484	.056
Biaya Agensi Manajerial	23.097	11.138	.545	2.074	.093
Proporsi Komisaris Independen	.665	1.327	.088	.501	.638
Dewan Direksi	-.294	.505	-.132	-.132	.555
Dewan Komisaris	-.709	.321	-.520	-2.211	.078

a. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebagai berikut:

1. Biaya Agensi Manajerial(X_1) adalah $0,093 > 0,05$ maka artinya Biaya Agensi Manajerial (X_1) tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* (Y).
2. Proporsi Komisaris Independen(X_2) adalah $0,638 > 0,05$ maka artinya Proporsi Komisaris Independen(X_2) tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* (Y).
3. Dewan Direksi(X_3) adalah $0,585 > 0,05$ maka artinya Dewan Direksi(X_3) tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* (Y).
4. Dewan Komisaris(X_4) adalah $0,078 > 0,05$ maka artinya Dewan Komisaris(X_4) tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* (Y).

b. Uji f Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4.9 Uji f Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.913	4	2.228	7.492	.024 ^b
	Residual	1.487	5	.297		
	Total	10.401	9			

a. Dependent Variable: Financial Distress

b. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Dewan Direksi , Biaya Agensi Manajerial, Proporsi Komisaris Independen

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan, menunjukkan taraf probabilitas sebesar $0,024 < 0,05$ yang artinya bahwa Biaya Agensi Manajerial (X_1), Proporsi Komisaris Independen (X_2), Dewan Direksi (X_3) dan Dewan Komisaris (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Distress* (Y).

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen Y .

Hasil pengujian determinasi menunjukkan nilai *adjusted* R^2 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926 ^a	.857	.743	.54537	2.212

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Dewan Direksi, Biaya Agensi Manajerial

b. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 24 (2020)

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,743 (74%) hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Biaya Agensi Manajerial Terhadap *Financial Distress*

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara parsial, didapati bahwa variabel bebas yaitu Biaya Agensi Manajerial tidak berpengaruh terhadap

variabel terikat yaitu *Financial Distress*. Berdasarkan Uji t Parsial, nilai sig dari Biaya Agensi Manajerial adalah 0,093 lebih besar dari 0,05 maka artinya Biaya Agensi Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan “biaya agensi manajerial secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*”, ditolak.

b. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Financial Distress*

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara parsial, didapati bahwa variabel bebas yaitu Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu *Financial Distress*. Berdasarkan Uji t Parsial, nilai sig dari Proporsi Komisaris Independen adalah 0,638 lebih besar dari 0,05 maka artinya Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan “proporsi komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*”, ditolak.

c. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Financial Distress*

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara parsial, didapati bahwa variabel bebas yaitu Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu *Financial Distress*. Berdasarkan Uji t Parsial, nilai sig dari Dewan Direksi adalah 0,585 lebih besar dari 0,05 maka artinya Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu,

hipotesis pertama yang menyatakan “dewan direksi secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*”, ditolak.

d. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Financial Distress*

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara parsial, didapati bahwa variabel bebas yaitu Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu *Financial Distress*. Berdasarkan Uji t Parsial, nilai sig dari Dewan Komisaris adalah 0,078 lebih besar dari 0,05 maka artinya Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan “dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*”, ditolak.

e. Pengaruh Biaya Agensi Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap *Financial Distress*

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara simultan, didapati bahwa variabel bebas yaitu Biaya Agensi Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu *Financial Distress*. Berdasarkan Uji f Simultan, nilai sig adalah 0,024 lebih kecil dari 0,05 maka artinya Biaya Agensi Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan “biaya agensi manajerial, proporsi komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*”, diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Biaya Agensi Manajerial (X_1) tidak berpengaruh terhadap kondisi *Financial Distress* (Y) pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018 dengan nilai signifikansi sebesar $0,093 > 0,05$.
2. Hasil dari pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen (X_2) tidak berpengaruh terhadap kondisi *Financial Distress* (Y) pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018 dengan nilai signifikansi sebesar $0,638 > 0,05$.
3. Hasil dari pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Dewan Direksi (X_3) tidak berpengaruh terhadap kondisi *Financial Distress* (Y) pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018 dengan nilai signifikansi sebesar $0,585 > 0,05$.
4. Hasil dari pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Dewan Komisaris (X_4) tidak berpengaruh terhadap kondisi *Financial Distress* (Y) pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018 dengan nilai signifikansi sebesar $0,078 > 0,05$.
5. Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa bahwa Biaya Agensi Manajerial (X_1), Proporsi Komisaris Independen (X_2), Dewan Direksi (X_3) dan Dewan Komisaris (X_4) berpengaruh terhadap kondisi

Financial Distress (Y) pada PT. Krakatau Steel tahun 2009 – 2018 dengan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$.

5.2 Saran

Setelah melakukan proses penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar penelitian ini nantinya dapat dikembangkan kembali serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, biaya agensi manajerial yang besar dan terus menerus terjadi dapat menyebabkan kondisi *financial distress*, umumnya hal ini terjadi karena manajer perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan secara *eksploitatif* untuk memenuhi tujuannya. Maka dengan mengaplikasikan GCG dengan baik, kondisi *financial distress* dapat diminimalisir bahkan kondisi keuangan perusahaan dapat diatasi.
2. Bagi perusahaan, umumnya proporsi komisaris independen yang lebih besar memiliki GCG yang lebih baik sehingga semakin kecil perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, namun karena proporsi komisaris independen perusahaan lebih sedikit dari seluruh dewan komisaris, sehingga semakin besar perusahaan mengalami kondisi *financial distress*, oleh karena itu perlunya penambahan komisaris independen.
3. Bagi perusahaan, dewan direksi dan dewan komisaris bekerjasama dan bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan serta membawahi pada bawahan secara efektif. Namun karena dewan direksi dan dewan komisaris sering dirombak kondisi *financial distress* sulit dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, R. (2019). ANALISIS KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM TIRTA WAMPU STABAT. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, 31(1), 15-21.
- Alfianika, Ninit. (2018). *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan. Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. *JEpa*, 4(2), 119-132.
- Irhan, Fahmi. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kusmayadi, et al. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya : LPPM Universitas Siliwangi.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance*. Solo: PT Era Adi Citra Intermedia.
- MaHanafi, Abdul Halim. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Manullang, M., & Pakpahan, M. (2014). *Metode Penelitian: Proses Penelitian Praktis*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Purba, R. B. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.

- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Rusdiyanto, et al (2019). *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rusiadi., Nur Subiantoro., Rahmat Hidayat. (2013). *Motode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Listrel*. Medan: USU Press.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-12
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sebayang, S., Novalina, A., Nasution, A. P., & Panggabean, L. S. R. (2019, April). An Empirical Investigation of The Factors Influencing Village Development: A Confirmatory Factor Analysis. In 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2018) (pp. 929-940). Atlantis Press.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

JURNAL:

- Barus, A., C., dan Setiawati, K. (2015). *Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* Volume 5, Nomor 01, Oktober 2015.
- Chrisna, H. (2019). PENGARUH PERILAKU BELAJAR, PENGENDALIAN DIRI, MOTIVASI, EMPATI, KETERAMPILAN, DAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100

- Cinantya, I.G.A.A.P. & Merkusiwati, N.K.L.A. (2015). *Pengaruh corporate governance, financial indicators, dan ukuran perusahaan pada financial distress. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Hadi, S., A., F., dan Andayani. (2014) *Mekanisme Corporate Governance dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Mengalami Financial Distress. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 5.*
- Helena, Severa dan Saifi. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 60 No. 2 Juli 2018.*
- Intan, R. & Darsono. (2017). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Biaya Agensi Manajerial, dan Leverage Terhadap Financial Distress. ISSN, Vol 6. No. 3, hal 2337-3806.*
- Merkusiwati, Ni Ketut Lely A. (2014). *Pengaruh mekanisme corporate governance, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan pada financial distress. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*
- Qolbia, Sifaul (2017). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya.*
- Widodo, S. (2019). STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN SIKLUS HIDUP PRODUK (PRODUCT LIFE CYCLE). JEpa, 4(1), 84-90.
- Yeni, Yustika. (2015). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Operating Capacity, dan Biaya Agensi Manajerial Terhadap Financial Distress. JOM Fekon, Vol. 2 No. 2, hal 1-15.*
- Yunus, R. N. (2019). KEMAMPUAN MENULIS ARGUMENTASI DALAM LATAR BELAKANG SKRIPSI MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. JUMANT, 11(1), 207-216.
- Zulaikah, Siti. (2016). *Perbandingan Financial Distress Bank Syariah Di Indonesia Dan Bank Islam Di Malaysia Sebelum Dan Sesudah Krisis Global 2008 Menggunakan Model Altman Z-Score.*

SKRIPSI:

- Mafiroh, Anis. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014).*
- Pramuditya, Andhika Yudha. (2014). *Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi Financial Distress (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012).*

Retnaningdya, Shintya Cahya. (2018). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Financial Distress Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Malaysia.*

Sakti, Mutiara. (2018). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016*

Sari, Yuni Kurnia. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress.*

INTERNET:

www.bumn.go.id

www.idx.co.id